

**UPAYA PENERAPAN KLAUSULA ARBITRASE
DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
DAGANG**

Disusun Oleh:

Tiesnawati Wahyuningsih, SH

NIP. 131644062

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA, 2001**

PENDAHULUAN

Pengaruh perkembangan dunia dan globalisasi mempunyai dampak yang sangat besar dalam bidang perdagangan. Hal ini dapat dilihat pada pelbagai perjanjian multilateral dan bilateral, free trade area, dan open door system di pelbagai penjuru dunia. Pada umumnya setiap perjanjian nasional maupun internasional yang dibuat selalu dicantumkan klausa arbitrase.

Terdapat berbagai alasan mengapa investor asing yang menanamkan modalnya di suatu negara tertentu, misalnya Indonesia merasa perlu menerapkan dan mempersyaratkan klausa arbitrase dalam setiap perjanjian yang dibuatnya. Alasan tersebut antara lain: 1) Penyelesaian arbitrase sangat sesuai dengan motto *time is money* dan prinsip mereka (efisien dan ekonomis). 2) Kurang mengetahui hukum negara tempat ia hendak menanam modalnya. 3) Peradilan umum terlalu lamban dalam menyelesaikan suatu perkara (misalnya di negara kita pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung) bisa memakan waktu bertahun-tahun lamanya. 4) Meskipun sudah ada keputusan akhir dari Mahkamah Agung, kita masih sering menemukan kendala untuk mengeksekusi keputusan tersebut.¹

Bagaimanapun perkembangan dunia usaha dan perdagangan internasional pada saat sekarang ini sudah mutlak diperlukan penyelesaian sengketa dalam bidang usaha dan dagang yang secara arbitrase, baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional, sebagai dilihat telah menggejala di negara berkembang maupun negara maju. Kenyataan bila di Indonesia belum banyak yang menggunakan arbitrase merupakan hal yang patut disayangkan, karena hal tersebut akan membebani peradilan umum.

¹ Niwan, Lely. 1995. *Arbitrase di Indonesia: Mengapa Harus Arbitrase*. Seri Dasar Hukum Ekonomi 2. Ghlia Indonesia. Jakarta.

Dalam hal kasus persengketaan antara pemerintah RI dengan PT Inti Indorayon Utama Tbk (IIU) mengenai tidak bolehnya beroperasi pabrik pulp tersebut investornya akan memperkarakan masalah penutupan ini ke arbitrase internasional. Penutupan itu dilakukan karena Pemerintah RI menganggap bahwa PT Inti Indorayon Utama Tbk (IIU) mempunyai andil yang sangat besar dalam masalah perusakan lingkungan, sedangkan menurut Direktur Keuangan dan Direktur Bank Credit Lyonnaise bahwa penutupan itu lebih disebabkan karena adanya perbedaan pendapat antara PT Indorayon Utama Tbk dengan masyarakat di sekitarnya.²

Walaupun kata Direktur PT IIU tidak sepenuhnya menginginkan rencana membawa masalah penutupan pabrik pulp tersebut ke arbitrase internasional, dengan alasan bahwa sesungguhnya langkah penyelesaian di arbitrase internasional bukanlah cara yang diharapkan oleh IIU. Dalam kasus tersebut kalangan LSM dan pemerhati lingkungan berpendapat, bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase internasional akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit serta akan menjatuhkan citra Indonesia di mata internasional.³

Bila dilihat dari contoh kasus tersebut diatas, maka keempat alasan para investor asing yang akan menanamkan modalnya di negara Indonesia misalnya, merupakan pendapat yang hampir sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutanto, dkk (1994) yang menyebutkan bahwa dalam praktek penerapan klausula arbitrase sering dipertentangkan dengan kompetensi absolut Pengadilan Negeri.⁴ Sehingga dapat dikatakan bahwa pada umumnya para pengusaha lebih menyukai penyelesaian perselisihan mereka melalui badan peradilan swasta yang mereka pilih sendiri.

² Kompas, tanggal 29 April 2000. *Investor Indorayon Ancam Seret RI ke Arbitrase Internasional*

³ Ibid.

SUMBER HUKUM ARBITRASE

Proses arbitrase di Indonesia merupakan bagian dari hukum acara. Hukum acara yang berlaku di Indonesia adalah seperti yang dimuat dalam "*Reglement Indonesia yang diperbaharui*" (RIB) tahun 1941, yang ternyata kemudian tidak memuat ketentuan-ketentuan tentang arbitrase.⁵

Sebelum diundangkan UU yang mengatur mengenai arbitrase, yaitu sampai dengan tahun 1999 di Indonesia bila terjadi persengketaan akan menggunakan alternatif penyelesaian secara arbitrase yang diakui keberadaannya oleh Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam penjelasan pasal 3 UU ini dijelaskan bahwa "Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase), tetap diperbolehkan". Akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari pengadilan.

Selain UU No. 14 tahun 1970, sumber hukum lainnya yang mengatur tentang arbitrase dapat ditemukan dalam "*reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*" (RV, S. 1847 No. 52 jo. S. 1849 No. 63, khususnya pasal 615 s.d. 651). Walaupun ketentuan tersebut adalah berasal dari masa penjajahan Belanda, tetapi dengan menggunakan Peraturan Peralihan dalam UUD 1945 memungkinkan berlakunya ketentuan-ketentuan dalam RV tetap berlaku setelah kemerdekaan Indonesia. Telah menjadi kesepakatan para sarjana dan praktisi hukum bahwa ketentuan-ketentuan dalam RV mengenai arbitrase dapat dipergunakan sebagai pedoman. Ketentuan-ketentuan dalam RV yang berasal dari abad ke-19 selama ini berlaku tanpa mengalami banyak perubahan.

⁵ Sutanto, dkk. 1994. *Perkembangan Penerapan Klausula Arbitrase Dalam Hubungannya Dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri*. Laporan Penelitian. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Akibatnya, tidak dapat mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi pada masa pasca kemerdekaan dan dengan makin meningkatnya ketergantungan ekonomi dunia.⁶

Dengan menggunakan peraturan arbitrase yang berasal dari jaman Belanda, kemudian dapat diperhatikan adanya kekurangan yang secara tidak langsung akan menyulitkan para pengusaha pada saat itu, yaitu tidak diaturnya aspek-aspek internasional dari arbitrase. Padahal hubungan dagang internasional dengan berbagai klausula arbitrase telah menjadi peristiwa sehari-hari. Karena berbagai alasan tersebut diatas, kemudian pada tahun 1977 didirikannya suatu badan arbitrase nasional yang kemudian dikenal dengan nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI didirikan atas prakarsa kamar Dagang dan Industri Indonesia merupakan suatu contoh penting dan merupakan konfirmasi dari eksistensi atau pengakuan terhadap adanya arbitrase. BANI memiliki peraturan dan prosedur arbitrase tersendiri dan menyediakan suatu panel arbiter.⁷

Mengimbangi pendirian BANI telah pula dilakukan ratifikasi terhadap beberapa konvensi multilateral tertentu yang kemudian menjadi tonggak keterlibatan Indonesia dalam hal-hal yang berkaitan dengan arbitrase internasional. Paling tidak telah diratifikasi dua konvensi internasional yang penting untuk dikemukakan, yaitu:

1. Konvensi Washington atau Konvensi ICSID yang diratifikasi pada tahun 1968 dengan UU No. 5 tahun 1968.
2. Konvensi New York yang diratifikasi tahun 1981 berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 tahun 1981.⁸

⁶ Goodpaster, Gary; Soebagjo, Felix O; dan Jatim, Fatimah. 1995. *Arbitrase Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang Di Indonesia*. Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2. PT Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal. 37

⁷ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

Untuk menunjang beberapa peraturan dan telah diratifikasinya beberapa konvensi tentang arbitrase, kemudian dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 1990 tentang Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing yang merupakan suatu contoh upaya pemerintah RI untuk melengkapi perundang-undangan yang berkaitan dengan arbitrase asing.

Dalam penjelasan UU No. 30 tahun 1999 yang menyatakan dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik secara nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka pedoman arbitrase secara nasional perlu diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan dewasa ini suatu pengaturan dagang yang bersifat internasional merupakan kebutuhan *conditio sine qua non* yang tidak diatur dalam Reglemen Acara Perdata. Bertolak dari hal tersebut maka kemudian disusun dan diundangkan suatu hukum nasional yang mengatur tentang arbitrase atau cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi sebenarnya tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka. Diundangkannya UU RI No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, menurut pembuat UU alasannya adalah karena peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya. Alasan tersebut sejalan dengan pendapat Sudargo Gautama yang menyatakan bahwa dunia usaha terutama yang bersifat internasional selalu takut untuk berperkara di hadapan badan-badan peradilan. Dan ini berlaku pula dalam setiap sistem negara, baik dinegara maju maupun negara berkembang. Pengusaha selalu takut berperkara bertahun-tahun karena dirasakan akan merugikan aktivitasnya. Seperti diketahui di negara kita, bila

berperkara di pengadilan umum akan memakan waktu yang berlarut-larut, walaupun telah diusahakan dengan berbagai peraturan yang dikeluarkan untuk mempercepat proses perkara.

TEORI KLAUSULA ARBITRASE

Sebenarnya perjanjian arbitrase merupakan suatu kontrak atau bagian dari suatu kontrak atau bahkan merupakan suatu kontrak yang berdiri sendiri. Perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak biasa disebut dengan klausula arbitrase. Klausula arbitrase dapat berupa perjanjian yang sederhana untuk melaksanakan arbitrase, tetapi dapat pula lebih komprehensif, memuat syarat-syarat arbitrase. Karena klausula arbitrase menentukan apakah akan berlangsung suatu arbitrase, bagaimana dilaksanakannya, hukum substantif apa yang berlaku, dan lain-lain, klausula arbitrase tersebut memegang peranan penting. Pada umumnya klausula arbitrase akan mencakup:⁹

1. Komitmen/kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase;
2. Ruang lingkup arbitrase;
3. Apakah arbitrase akan berbentuk arbitrase institusional atau 'ad hoc'; apabila memilih bentuk ad hoc, maka klausula tersebut harus merinci metode penunjukan arbiter atau majelis arbitrase;
4. Aturan prosedural yang berlaku;
5. Tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase;
6. Pilihan terhadap hukum substantif yang berlaku bagi arbitrase;
7. Klausula-klausula stabilisasi dan hak kekebalan (imunitas), jika relevan.

⁹ Ibid

Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan klausula arbitrase harus dilakukan secara teliti, cermat, dan harus memuat komitmen yang jelas terhadap arbitrase serta pernyataan tentang sengketa apa yang akan diselesaikan secara arbitrase. Penyusunan klausula secara demikian adalah mempunyai tujuan pokok untuk menghindarkan terjadinya peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan di kemudian hari apabila terjadi sengketa.

BENTUK-BENTUK ARBITRASE

Dalam penentuan klausula arbitrase harus pula memuat pernyataan mengenai bentuk-bentuk arbitrase. Pada umumnya terdapat dua macam arbitrase yaitu yang bersifat ad hoc dan yang bersifat permanen.¹⁰ Yang dimaksud dengan arbitrase Ad Hoc adalah penyelesaian sengketa dimana para pihak dapat mengatur cara-cara pelaksanaan pemilihan para arbiter, kerangka kerja prosedur arbitrase dan aparatur administratif dari arbitrase. Karena proses pemeriksaan arbitrase berlangsung tanpa adanya pengawasan atau peninjauan yang bersifat lembaga, persetujuan para pihak terhadap metode-metode pengangkatan arbiter yang cakap, kompeten dan berpengalaman merupakan hal penting.¹¹ Arbitrase Ad Hoc jarang dilakukan, karena banyaknya kesulitan yang dialami oleh para pihak dalam melakukan negosiasi dan menetapkan aturan-aturan prosedural dari arbitrase serta perencanaan metode pemilihan arbiter yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, seringkali para pihak memilih jalan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase institusional.

Arbitrase institusional adalah merupakan suatu organisasi yang menyediakan jasa administrasi arbitrase yang biasanya meliputi pengawasan

¹⁰ Sutanto. dkk. Op cit

¹¹ Goodpaster. dkk. Op cit. Hal 25

terhadap proses arbitrase, aturan-aturan prosedural sebagai pedoman bagi para pihak dan pengangkatan para arbiter.¹² Peran lembaga arbitrase institusional sangat mendukung pelaksanaan arbitrase, sehingga sering para pihak yang bersengketa menggunakan jasa lembaga arbitrase tersebut. Walaupun merupakan lembaga yang menjual jasa, akan tetapi kebebasan dan otonomi para pihak juga diterapkan disini bahkan para pihak yang menggunakan lembaga arbitrase dapat menyesuaikan proses arbitrase dengan prosedural yang telah mereka pilih dan sepakati.

KEUNTUNGAN ARBITRASE

Akibat bertumpuknya perkara di pengadilan dapat menyebabkan terjadinya proses peradilan yang memakan waktu bertahun-tahun. Pada umumnya disebabkan karena para pihak yang berselisih belum melihat manfaat penyelesaian perselisihan di luar pengadilan. Sebenarnya apabila para pengusaha berpegang pada prinsip *'time is money'*, maka langkah penyelesaian persengketaan yang mudah adalah dengan melalui lembaga arbitrase. Secara terperinci terdapat beberapa keuntungan yang dapat dikemukakan, yaitu sebagai berikut:¹³

1. Menang waktu, karena dapat dikontrol oleh para pihak sehingga kelambatan dalam proses peradilan pada umumnya dapat dihindari.
2. Kerahasiaan proses penyelesaian sengketa sangat dibutuhkan dalam dunia usaha dapat dikatakan lebih terjamin.
3. Macam-macam bukti dalam penyelesaian perselisihan yang tidak terletak dalam bidang yuridis pun dapat digunakan, sehingga tidak perlu terlambat

¹² Ibid hal 26

karena ketentuan undang-undang mengenai pembuktian yang bersangkutan.

4. Suatu putusan arbitrase pada umumnya terjamin, tidak memihak, mantap, dan jitu karena diputuskan oleh (orang) ahli yang pada umumnya menjaga nama dan martabatnya oleh karena kebiasaan berprofesi dalam bidang tersebut.
5. Keuntungan yang lain ialah peradilan arbitrase potensial menciptakan profesi yang lain, yaitu sebagai arbiter yang merupakan faktor pendorong untuk para ahli lebih menekuni bidangnya untuk mencapai tingkat paling atas secara nasional.

TAHAP-TAHAP PELAKSANAAN ARBITRASE¹⁴

Jika ditinjau prosedur terjadinya arbitrase maka sekurang-kurangnya dapat dibedakan tiga tahap besar, yaitu:

1. Negosiasi adalah negosiasi yang menghasilkan penyusunan arbitrase dagang; sedangkan negosiasi yang gagal, tidak menghasilkan sesuatu, tidak akan dibahas.

Kata negosiasi pada umumnya dipakai untuk suatu pembicaraan atau perundingan dengan tujuan mencapai kesepakatan antara para peserta tentang hal yang dirundingkan. Kata ini biasanya lebih digunakan dalam hubungan perdagangan yang berkaitan erat dengan suatu kontrak dagang atau usaha.

Dalam melakukan negosiasi suatu perjanjian usaha yang paling penting diperhatikan adalah dari segi ekonomi, hukum dan psikologi. Dan setiap

¹⁴ Toar, Agnes M. 1995. *Arbitrase di Indonesia. Uraian Singkat tentang Arbitrase Dagang di Indonesia*. . Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2. PT Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 37

usaha harus ada perhitungan untung ruginya, yang kemudian dibawa ke meja perundingan. Dalam UU No. 30 tahun 1999 ternyata tidak memuat ketentuan mengenai negosiasi.

Tetapi menurut hukum yang berlaku di Amerika Serikat dan negara-negara Inggris – Amerika berdasarkan perbuatannya maka negosiasi dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Penolakan berunding (*refusal to deal*) umumnya ditetapkan dalam beberapa bidang aktivitas ekonomi tertentu, dan lazim disebut sebagai "*compulsary contract*". Usaha yang termasuk kedalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah dan yang bersifat pelayanan umum maka menurut hukum yang berlaku wajib melayani semua permohonan pelayanan tanpa diskriminasi dan dengan syarat yang pantas.
 - b. "*Refusal to bargain in good faith*" juga merupakan dasar untuk membebaskan tanggung jawab pada pihak tertentu dalam hal penolakan berunding dengan "iktikad baik".
 - c. "*Reliance*" adalah dasar bagi kelompok kasus yang berhubungan dengan harapan dan kepercayaan tertentu pada salah satu pihak yang timbul selama proses negosiasi berlangsung.
2. Pengangkatan para arbiter dan penyelenggaraan (sidang-sidang) arbitrase sendiri.

Pengangkatan dalam perjanjian arbiter biasanya dilakukan dengan menyebutkan nama arbiter yang ditunjuk, cara pelaksanaan arbitrase yang akan dilakukan, jumlah arbiter dan lain-lainnya. Bila dalam klausula arbitrase tidak menyebutkan mengenai nama arbiter yang akan menjalankan tugas, maka digunakan ketentuan dalam pasal 619 RV sebagai pedoman. Akan tetapi berdasarkan UU No. 30 tahun 1999 dalam pasal 12

¹¹ Ibid. hal 45

mengenai syarat pengangkatan Arbiter menyebutkan bahwa yang dapat diangkat dan ditunjuk sebagai arbiter adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum, berusia minimal 35 tahun, tidak mempunyai hubungan darah sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase, dan mempunyai pengalaman serta secara aktif bergerak dibidangnya paling sedikit 15 tahun. Dalam ayat (2) menyebutkan juga bahwa hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Dalam pasal 13 ayat 1 menyebutkan bila tidak ada kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan mengenai pengangkatan arbiter, maka yang berwenang menunjuk arbiter atau majelis arbitrase adalah Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Sedangkan mengenai penyelenggaraan sidang-sidangnya ditentukan dalam Bab IV mengenai Acara yang berlaku di hadapan Majelis Arbitrase pada bagian pertama mengatur mengenai acara arbitrase dalam pasal 27 s.d. pasal 48 UU No. 30 tahun 1999. Dalam pasal 27 menentukan pemeriksaan sengketa oleh arbiter dilakukan secara tertutup dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia atau bahasa lain atas persetujuan arbiter (pasal 28).

Menurut Agnes (1995) yang paling perlu diperhatikan adalah bagian-bagian penting dalam suatu perjanjian arbitrase. Suatu perjanjian arbitrase yang baik terdiri atas bagian-bagian yang hakiki sebagai berikut:

- a. Persetujuan menyerahkan sengketa yang timbul dari suatu perjanjian dagang pada suatu arbitrase. Persetujuan mengenai hal ini harus dinyatakan secara eksplisit sebagai salah satu syarat perjanjian arbitrase itu, dengan atau tanpa disertai alasan-alasan memilih cara penyelesaian sengketa secara arbitrase.

- b. Penentuan aturan-aturan yang akan dipakai dalam sidang-sidang mencakup pula jumlah sidang dan macam-macam pembuktian.
 - c. Penentuan tempat sidang arbitrase ditentukan para pihak berdasarkan faktor-faktor yang dipandang paling menguntungkan dari segi ekonomi. Kalau memilih salah satu badan arbitrase yang tetap, maka berarti masalah tempat tidak menjadi masalah.
 - d. Penentuan (jumlah) para arbiter (di Indonesia syarat jumlah ganjil).
 - e. Pemilihan hukum yang berlaku (bagi arbitrase internasional) dan bahasa yang digunakan dalam sidang maupun putusan para arbiter.
 - f. Penentuan waktu putusan arbitrase harus sudah ada, sehingga bagi para pihak semuanya jelas dan dapat mengadakan perencanaan selanjutnya berdasarkan jadual tersebut.
3. Putusan arbitrase dan pelaksanaan putusan arbitrase.
- UU No. 30 tahun 1999 dalam Bab VI mengenai Pelaksanaan Putusan Arbitrase membedakan atas dua bagian yaitu bagian pertama untuk arbitrase yang bersifat nasional yang diatur dalam pasal 59 s.d. pasal 64; sedangkan bagian kedua mengatur tentang arbitrase internasional yang diatur dalam pasal 65 s.d. pasal 69.
- Pembagian dilakukan karena terdapat perbedaan prosedur pelaksanaan putusan arbitrase yang bersifat nasional dengan arbitrase internasional. Persamaannya hanyalah pada keduanya adanya pengaturan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak (dalam arbitrase nasional diatur dalam pasal 60; sedangkan dalam arbitrase internasional diatur dalam pasal 68 ayat 1).

PENUTUP

Pengaruh perkembangan dunia dan globalisasi mempunyai dampak yang sangat besar dalam bidang perdagangan. Pengaruh tersebut menimbulkan pelbagai perjanjian multilateral dan bilateral, *free trade area*, dan *open door system* di pelbagai penjuru dunia. Pada umumnya setiap perjanjian nasional maupun internasional yang dibuat selalu dicantumkannya klausula arbitrase.

Pencantuman klausula arbitrase dalam setiap perjanjian yang dibuat karena biasanya pengusaha memegang erat motto *time is money*. Serta adanya ketakutan untuk berperkara di pengadilan umum karena adanya anggapan bahwa bila prosedur di pengadilan terlalu berbelit belit dan tidak efisien sehingga akan merugikan usaha mereka. Selain itu dalam pelaksanaan keputusannya kadang-kadang masih sering menemukan kendala untuk mengeksekusi keputusan tersebut.

Untuk lebih mempercepat waktu dan kepentingan kepastian hukum, maka kemudian pada tahun 1999 telah disusun dan diundangkannya peraturan yang mengatur mengenai arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa yang diatur dalam UU No. 30 tahun 1999. Mulai saat inilah Indonesia mempunyai pedoman yang pasti yang mengatur tentang Arbitrase. UU ini juga mengatur mengenai arbitrase dalam skala nasional dan internasional, siapa saja yang dapat diangkat sebagai arbiter dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Goodpaster, Gary; Soebagjo, Felix O; dan Jatim, Fatimah. 1995. *Arbitrase Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang Di Indonesia*. Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2. PT Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Niwan, Lely. 1995. *Arbitrase di Indonesia: Mengapa Harus Arbitrase*. Seri Dasar Hukum Ekonomi 2. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sutanto, dkk. 1994. *Perkembangan Penerapan Klausula Arbitase Dalam Hubungannya Dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri*. Laporan Penelitian. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Tunggal, Hadi Setia. 2000. *Undang-undang RI No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa*. Harvarindo. Jakarta.
- Toar, M. Agnes. 1995. *Arbitrase di Indonesia: Uraian Singkat Tentang Arbitrase Dagang Di Indonesia*. Seri Dasar Hukum Ekonomi 2. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Kompas, tanggal 29 April 2000. *Investor Indorayon Ancam Seret RI ke Arbitrase Internasional*.